

Propam Polri Kirim Tim Khusus Selidiki 2 Oknum Polisi Jual Senjata ke KKB Papua

JAKARTA (IM) - Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irfan Ferdy Sambo mengirimkan tim khusus ke Polda Maluku untuk menyelidiki dua anggota polisi yang diduga terlibat penjualan senjata api kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Ferdy mengatakan, kedua anggota polisi itu berasal dari Polresta Pulau Ambon dan Polres Pulau Lease. “Propam Polri mengirim tim khusus untuk mendampingi Propam Polda Maluku melakukan penyelidikan kasus ini,” kata Ferdy dalam keterangan tertulis, Senin (22/2).

Ia menyatakan, jika kedua anggota polisi itu terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka perkara akan diajukan ke pengadilan. Selanjutnya, sidang Komisi Etik Propam Polri akan segera dilakukan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Ferdy pun meminta masyarakat melapor jika mengetahui ada tindak pidana yang melibatkan anggota Polri.

“Polri mengajak masyarakat untuk memantau dan mencermati kasus-kasus yang melibatkan anggota Polri di seluruh wilayah hukum RI,” tuturnya.

Diberitakan, sebanyak enam warga Kota Ambon, Maluku, termasuk dua anggota Polri, diduga terlibat dalam penjualan senjata api kepada KKB di Papua. Penjualan itu digambarkan anggota Polres Bintuni, Papua Barat. Mereka kini sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik

Polda Maluku di Ambon.

Perantara

Setelah menangkap 6 pelaku penjualan senjata kepada KKB Papua, polisi juga menangkap dua warga sipil yang bertindak sebagai perantara dalam proses jual-beli senjata api (senpi) dan amunisi kepada KKB Papua. Keduanya ditangkap di Ambon.

Kedua polisi, kedua tersangka mengaku motif pelaku untuk menjadi perantara penjualan senjata api tersebut adalah ekonomi. Keduanya bukan kelompok KKB Papua, tapi hanya warga biasa saja.

Diberitakan sebelumnya, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol M Roem Ohoriat mengatakan, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Polda Papua Barat serta Polres Bintuni terkait penangkapan seorang tersangka yang membawa senpi dan amunisi dari Kota Ambon.

“Dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap pelaku yang ditahan di Polres Bintuni, mengaku kalau senpi dan amunisi tersebut dibeli dari Ambon,” kata Kabid Humas, Minggu (21/2).

Dia menegaskan, karena kasus dugaan penjualan senpi serta amunisi dari Ambon ini masih dalam proses penyelidikan sehingga Humas Polda Maluku belum dapat memberikan penjelasan lebih rinci.

“Misalnya jenis senjata api dan kaliber amunisinya, dijual oleh siapa saja dan modul operasinya untuk apa,” ucapnya. ● **lus**

Kapolda Papua Ganti 9 Kapolres, Tiga Polres di Antaranya Masuk Zona Merah KKB

JAYAPURA (IM) - Polda Papua melakukan mutasi beberapa jabatan utama di lingkungan Polda Papua dan sembilan kapolres. Dari sembilan kapolres yang diganti, ada tiga Polres yang wilayahnya masuk dalam zona merah karena keberadaan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Khusus untuk Nduga, Puncak dan Intan Jaya, tiga daerah yang menurut kami sangat merah, itu memerlukan kiat-kiat dari kapolres yang baru untuk bagaimana mendapatkan peran dari para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan di sana dan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bagaimana bisa memasuki pikiran-pikiran dari KKB,” ujar Kapolda Papua Irfan Ferdy Paulus Waterpauw di Jayapura, Senin (22/2).

Ketiga kapolres yang dilantik itu adalah Kompol I Komang Budhiarta yang akan bertugas di Kabupaten Nduga, Kompol I Nyoman Purnia di Kabupaten Puncak, dan AKBP Sandi Sultan di Kabupaten Intan Jaya.

Paulus menekankan agar ketiga Kapolres itu segera membangun komunikasi dengan pemerintah daerah setempat. Sehingga, polisi bisa menjaga keamanan wilayah tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah sangat berperan dalam menangani KKB. Pemerintah daerah bisa melakukan pendekatan lewat jalur kekeuangan.

“Yang bisa menanganinya mereka (KKB) adalah pemerintah daerah dengan

berkomunikasi menggunakan bahasa-bahasa daerah, kemudian selanjutnya mencari solusi untuk kehidupan mereka, saya yakin itu bisa,” katanya.

Hal tersebut, kata Paulus, telah terbukti di beberapa kabupaten, yaitu di Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mambera Tengah, Tolikara, dan Jayawijaya.

Paulus lebih lanjut mengatakan, di lima kabupaten tersebut, sudah banyak mantan anggota KKB yang dirangkul dan kini bekerja di pemerintahan.

“Sudah ada daerah lain yang bisa melakukan pendekatan dengan berdialog dan pendekatan kesejahteraan sehingga para pihak ini sudah ikut turun masuk ke dalam lingkungan masyarakat dan bekerja. Ini kemudian berkurangnya kekerasan yang selama ini mereka lakukan,” kata Paulus.

Selain tiga kapolres itu, Kapolda Papua juga melantik sejumlah pejabat di berbagai posisi. Di antaranya, AKBP Cosmos Jujungan menjadi Dirlatih Polda Papua, AKBP Demianus Dedy Susanto sebagai Kapolres Mappi, AKBP Ferdian Indra Fahmi sebagai Kapolres Kepulauan Yapen, dan AKBP Cahyo Sukarnito menjabat Kapolres Pegunungan Bintang.

Lalu, AKBP Moh Darohat Daimboa sebagai Kapolres Supiori, AKBP Hesan S Napitupulu sebagai Kapolres Yalimo, AKBP Herizoni Saragi sebagai Kapolres Deiyai, dan lainnya. ● **lus**

12 | PoliceLine

IDN/ANTARA



Polri Beri Pelatihan *Public Speaking* ke Kapolres dan Kabid Humas Polda

Humas di organisasi Polri merupakan instrumen strategis yang diperlukan untuk membangun *image* positif bagi eksistensi Polri di masyarakat.

JAKARTA (IM) - Para Kapolres dan Kabid Humas Polda di seluruh Indonesia akan mengikuti pelatihan *public speaking*. Pelatihan *public speaking* digelar Polri dalam rangka tindak lanjut 100 hari program prioritas Kapolri,

yakni pemantapan komunikasi publik.

Kadiv Humas Polri Irfan Argo Yuwomo menyebut pelatihan itu dilakukan sebagai bekal kepada setiap kapolres ataupun kabid humas agar bisa membuat citra Polri menjadi

positif di depan publik.

“Ini sebagai bentuk penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. Serta sebagai bekal bagi seluruh kapolres dan kabid humas agar memiliki kemampuan berbicara di depan publik dan media yang profesional dan berdampak positif bagi citra Polri,” ujar Argo melalui keterangan tertulis, Senin (22/2).

Adapun pelatihan yang mengusung tema Penguatan Kapasitas SDM Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas,

Transparansi, dan Berkeadilan) ini diikuti oleh seluruh Kabid Humas Polda. Selain itu, perwakilan Puspren TNI, Dispen TNI AD, Dispen TNI AL, dan Dispen TNI AU, juga hadir secara virtual.

Argo berharap peserta pelatihan mempelajari bagaimana mengemas teknik komunikasi verbal dan non verbal agar dapat disampaikan secara efektif. Hal ini penting untuk menciptakan citra positif Polri dalam membangun kepercayaan masyarakat.

“Saya harap peserta pelatihan dapat memanfaatkan pelatihan ini dan dapat menjadi manfaat serta betul-betul menjadi momentum peningkatan kapasitas diri sebagai leading sektor wajah Polri di wilayah,”

kata Argo.

Argo menegaskan bahwa fungsi kehumasan pada organisasi Polri merupakan instrumen strategis yang diperlukan untuk membangun komunikasi yang sejajar dengan masyarakat, sekaligus konstruktif, terkait dengan terbangunnya *image* positif bagi eksistensi Polri.

Sehingga memungkinkan terwujudnya kesepahaman pengertian serta dapat menumbuhkan kepercayaan melalui terbangunnya reputasi Polri yang baik di mata masyarakat.

Pelatihan *public speaking* dilaksanakan mulai Senin (22/2) hingga Jumat (26/2). Peserta yang mengikuti pelatihan mencapai 530 personel. ● **lus**

KASUS PELEMPARAN PABRIK TEMBAKAU

Polda NTB Tegaskan Tidak Menahan 4 Ibu Rumah Tangga dan Anaknya

MATARAM (IM) - Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan polisi tak melakukan penahanan terhadap 4 ibu rumah tangga terkait kasus pelemparan batu ke pabrik rokok di Lombok Tengah, NTB. Kasus ini sudah dilimpahkan ke pihak kejaksaan.

“Saya rasa apa yang dikatakan Pak Haris Azhar kurang tepat, karena selama perkara ditangani kepolisian, tidak ada penahanan,” kata Kabid Humas Polda NTB, Kombes Artanto, Senin (22/2).

Artanto menyampaikan tanggapannya soal cuitan di akun Twitter resmi Pendiri Lokataru Indonesia, Haris Azhar. Haris diketahui mengaitkan polisi dengan penahanan 4 ibu rumah tangga (IRI).

“Kapolri (yg baru) bicara apa, anak buahnya lakukan apa.. kok ngga berubah @DivHumas_Polri tdk perlu kasus spt ini pakai ditahan terlampunya..” cuit Haris.

Menurut Artanto, polisi dalam perkara ini telah berusaha memediasi. Namun pihak pelapor dan terlapor tak kunjung mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara. “Kepolisian, dalam hal ini pihak Polres Lombok Tengah sudah menempuh upaya-upaya mediasi demi menyelesaikan masalah ini secara restorative justice,” jelasnya.

“Namun berbagai cara yang ditempuh tidak terca-

pai kesepakatan hingga pada proses P-21. Saat ini perkara di kejaksaan,” ujarnya menambatkan.

Diketahui, 4 ibu-ibu tersebut ditahan di Lapas Praya setelah melempari sebuah pabrik rokok dengan batu. Wanita-wanita itu ditahan bersama anak-anaknya.

“Tersangka H, NH, M, dan F yang ditahan di Lapas Praya beserta dua anaknya yang masih (membutuhkan) ASI karena disangka secara bersama-sama melakukan perusakan berupa pelemparan (batu) yang mengakibatkan spandek (pabrik rokok) peok,” ujar pengacara Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Mataram, Yan Mangandar Putra, dalam keterangannya, Sabtu (20/2).

Insiden pelemparan itu terjadi di sebuah pabrik rokok di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, pada 26 Desember 2020, pukul 16.00 Wita. Akibat aksi pelemparan batu itu, pabrik rokok itu disebut menderita kerugian Rp 4,5 juta.

“Sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (1) KUHP, ancaman hukum penjara 5 tahun 6 bulan,” kata Yan.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB menepis kabar telah menahan 4 ibu rumah tangga (IRI) bersama anak-anaknya terkait kasus pelemparan batu ke pabrik rokok di Lombok

Tengah. Kejati NTB mengatakan 4 IRT itu yang sengaja membawa anak-anaknya.

“Bahwa terkait pemberitaan dan foto yang beredar di medsos bahwa para terdakwa ditahan bersama anaknya oleh pihak Kejaksaan adalah tidak benar, melainkan keluarga para terdakwa dengan sengaja membawa anak para terdakwa di Polsek Praya Tengah maupun di Rutan Praya untuk ikut bersama para terdakwa berdasarkan izin pihak Rutan,” kata Kasipenkum Kejati NTB Dedi Irawan dalam keterangannya, Senin (22/2).

Saat ini keempat ibu rumah tangga tersebut sudah menghirup udara bebas. Penahannya ditanggihkan setelah pihak kejaksaan mendapat perintah dari hakim Pengadilan Negeri (PN) Praya.

“Kami hanya pelaksana penetapan hakim. Memang benar sudah kami laksanakan pengeluaran dari tahanan baru saja sekitar jam 14.01 Wita setelah selesai sidang,” kata Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Dedi Irawan, saat dimintai konfirmasi siang tadi.

Dia mengatakan agenda sidang keempat terdakwa dimajukan hari ini. Setelah sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, keempat terdakwa H, NH, M, dan F ditanggihkan penahanannya. ● **lus**

Polisi Sita Perahu Karet Berlogo FPI Saat Evakuasi Korban Banjir di Cipinang Melayu

JAKARTA (IM) - Polisi menyita perahu karet bertuliskan “Front Pembela Islam (FPI)” saat proses evakuasi korban banjir di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Sabtu (20/2).

“Kami mengamankan sarana prasarana (milik FPI) yang ada pada gambar viral itu,” kata Kapolres Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan dalam rekaman suara yang diterima wartawan, Senin (22/2).

Sebelumnya firal foto di media sosial yang menampilkan perahu karet bertuliskan FPI saat evakuasi banjir di Cipinang Melayu. Foto tersebut diunggah akun Twitter @IB_FPI pada Sabtu (20/2) sore.

Erwin mengatakan, penyitaan yang dilakukan aparat sudah sesuai dengan aturan.

“Kita ketahui bersama-sama bahwa SKB Enam Menteri yang dikeluarkan tentang pelanggaran atribut FPI kemudian

ada Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/1/2021 tentang pelanggaran adanya simbol, gambar, tulisan dan lain-lain terkait atribut FPI, kita tetap dengan tegas melarang kegiatan itu,” kata Erwin.

Lebih lanjut Kombes Erwin Kurniawan mempersilakan siapa saja untuk memberikan bantuan kemanusiaan, asal tidak menggunakan atribut yang dilarang negara seperti Front Pembela Islam (FPI).

“Kalaupun memberikan bantuan kemanusiaan lebih baik tidak menggunakan atribut atau simbol-simbol yang dilarang,” kata Erwin.

Kapolsek Makasar Kompol Saiful Anwar membenarkan bahwa insiden itu terjadi pada Sabtu pagi.

Saiful mengatakan, atribut FPI yang dipakai masih menggunakan logo yang lama.

“Mereka pakai (logo) FPI lama kok. Mau persaudaraan atau FPI saja tidak boleh,” ucap Saiful, Minggu (21/2). ● **lus**

Polisi Minta Pendukung Habib Rizieq Patuhi Prokes saat Datang ke Pengadilan

JAKARTA (IM) - Pihak Kepolisian meminta agar pendukung Habib Rizieq untuk mematuhi protokol kesehatan saat datang menyaksikan sidang perdana praperadilan saat sidang penyidikan dan penahanan mantan Imam Besar FPI, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

“Pertama tentu imbauannya untuk tidak berkerumun, tetap melaksanakan protokol kesehatan dan ikuti aturan hukum yang ada,” ujar Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Azis Andriansyah pada wartawan, Senin (22/2).

Dia memastikan, polisi tak melarang ataupun membolehkan pendukung Habib Rizieq untuk datang ke PN Jakarta Selatan.

Pihaknya hanya menghimbau para pengunjung PN untuk mematuhi protokol kesehatan bila memang ada di PN Jakarta Selatan, khususnya pendukung Habib Rizieq meski sejatinya para pendukung itu diharapkan untuk tidak datang.

“Kemudian kalau sudah masuk sistem praperadilan kita serahkan dengan sistem praperadilan yang ada,” ujarnya.

Azis mengatakan, penyekatan jalanan, polisi sejauh ini belum melakukannya lantaran situasi saat ini pun cukup

konduktif. Namun, polisi tetap mengerahkan personelnya guna pengamanan sidang praperadilan tersebut.

“Tetap kita tidak ingin under estimate ya. Pelaksanaan keamanan maksimal sesuai dengan perkiraan keadaan, personel pengamanan dibantu oleh Polda Metro Jaya dan dari Polres sendiri serta Polsek, termasuk Brimob. Total ada sekitar 190-an,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan pada Senin (22/2) pagi, puluhan polisi tampak berjaga di kawasan PN Jakarta Selatan, khususnya di dalam area pengadilan. Namun, pengamanannya tampak tak seketat saat praperadilan Habib Rizieq sebelumnya.

Saat praperadilan penetapan tersangka Habib Rizieq, kepolisian memenuhi area luar Jalan Ampera, depan gedung PN Jakarta Selatan hingga di dalam area PN.

Namun, kini hanya ada sejumlah personel saja yang berjaga di depan PN Jaksel dan hanya ada sejumlah kendaraan mobil barokuda dan alat berat lainnya guna mengantisipasi hal tak diinginkan. Meski begitu, kepolisian tetap memeriksa siapapun yang datang ke PN Jaksel guna mengantisipasi hal tak diinginkan. ● **lus**

國際日報
Guo Ji Ri Bao - Medan

Lowongan Kerja 职位空缺

MARKETING FREELANCE

Syarat :

- Di Utamakan Bisa berbahasa mandarin lisan dan tulisan
- Penampilan Menarik dan Rapi
- Orientasi Target dan Komisi
- Minimal Lulusan SMA / Sederajat
- Berpengalaman di bidang Marketing
- Domisili Medan - Sumatera Utara

Lamaran dikirim Via Email :
w.pandjaitan1@gmail.com



PENANGKAPAN KOMPLOTRAN PERAMPOK NASABAH BANK

Petugas menjaga para tersangka komplotan perampok nasabah bank saat rilis di Mapolres Serang, di Serang, Banten, Senin (22/2). Aparat Polres Serang menangkap empat orang komplotan perampok nasabah bank dengan modus memecahkan kaca dan pengembosan nas mobil saat beraksi di Serang. Kelompok tersebut pernah melakukan aksi serupa di wilayah Palembang, Semarang, Cilacap serta di sejumlah tempat lainya di Jatim.